

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Ende yang terletak di Jln. Eltari Kecamatan Ende Timur Kelurahan Mautapaga.

Waktu Juni-juli 2023

3.2 Jenis Dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data Menurut Sumbernya

a) Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, data yang bersumber dari hasil wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan

b) Data Sekunder

Data yang telah diolah dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media berupa foto dan data anggaran dan realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Ende tahun 2018-2020

3.2.2 Jenis Data Menurut Sifatnya

a) Data Kuantitatif

Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka -angka yang berhubungan dengan penelitian ini berupa data laporan Keuangan Kabupaten Ende

b) Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, uraian dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian ini khususnya yang terkait dengan gambaran umum Kabupaten Ende

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pencatatan dari dokumen -dokumen yang berkaitan yang telah terdokumentasi berupa dokumen-dokumen Lembaga sesuai dengan masalah yang dibahas seperti foto, kegiatan dan dokumen seperti Laporan Realisasi Anggaran (pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah)

2) Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi tentang pengolahan keuangan Daerah dengan pegawai yang ada di dinas badan pengelola Keuangan daerah pemerintahan Kabupaten Ende

3.4 Defenisi Operasional Variabel

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu dirai oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif yang dapat diukur perkembangan dengan mengadakan analisis terhadap data keuangan yang tercermin dalam laoran keuangan.

2. Rasio Keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahyudi (2019) rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah.

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima

d. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan, pendapatan atau belanja secara positif dan negative

e. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah.

f. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

g. Analisis Pertumbuhan Belanja

analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun

h. Rasio Efisiensi Belanja

Merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

i. Rasio Keserasian Belanja

Merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktiivitas) sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran belanja yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung

j. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah

k. Rasio Belanja Operasioanl

Rasio belanja operasional merupakan perbandigan antara realisasi belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja yang

pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang memberi manfaat jangka pendek.

1. Analisis Penggunaan SILPA tahun Lalu

Pos sisa lebih pembiayaan anggaran dalam laporan realisasi anggaran merupakan sisa lebih anggaran tahun lalu. Pada umumnya pos SILPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran.

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:224) Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik analisis data menggunakan rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

a. Rasio Pendapatan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah juga untuk menciptakan sistem pembiayaan adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab serta untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

$$\text{Rasio kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan asli Daerah}}{\text{Transfer pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	>25 – 50	Konsultatif
Sedang	>50 – 75	Partisipatif
Tinggi	>75 – 100	Delegative

Sumber: Abdul halim, 2001

2. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas bertujuan untuk melihat kemampuan pemerintah dalam suatu daerah dalam mewujudkan realisasi pada pendapatan daerahnya sendiri kemudian selanjutnya akan dibagi dengan anggaran yang telah ditentukan dalam potensi nyata dalam suatu daerah

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Mahmudi (2019)

3. Rasio Efisiensi Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Sangat Efisien	< 10%
Efisiensi	10% - 20%
Cukup Efisien	21% -30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	> 40%

Sumber: *Mahmudi (2019)*

4. Rasio pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan Pendapatan ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dalam satu periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{Pendapatan } (T - 1)}{\text{Pendapatan Th } (T - 1)} \times 100 \%$$

5. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal bertujuan untuk menghitung dan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Derajat disentralisasi	Keterangan
0,00 – 10,00	Sangat rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: *Tim Litbag Depdagri-Fisipol UGM, 2010*

6. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi perusahaan Daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 3.4
Kriteria Derajat Kontribusi BUMD

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Sangat Baik	>50%
Baik	40%-50%
Sedang	30%-40%
Cukup	20%-30%
Kurang	10%-20%
Sangat Kurang	<10%

Sumber: Abdul Halim, 2004

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

b. Rasio Belanja Daerah

1. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi belanja thn } t - \text{Realisasi Belanja } (t - 1)}{\text{realisasi Belanja } t - 1}$$

Table 3.5
Kriteria Pertumbuhan Belanja Daerah

Kriteria	Presentase
Rendah	0%-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

Sumber: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh

2. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.6

Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Kriteria Efisiensi Belanja	Presentase Efisiensi Belanja
Efisien	<100%
Efisiensi Berimbang	=100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Mohamad Mahsun (2012)

3. Rasio Belanja Operasional

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

4. Rasio Belanja Modal Dan Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja modal} = \frac{\text{Realisasi belanja modal}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Keserasian Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total belanja Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Pembiayaan Daerah

1. Analisis penggunaan SILPA Tahun Lalu

$$\text{SILPA} = \text{Surplus/ Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

2. Pertumbuhan setiap Item Pembiayaan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{nilai akhir} - \text{nilai awal}}{\text{nilai awal}} \times 100$$